

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita & Westra. 2011. .Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Budi Harsono, 2007, Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok agraria Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional Jilid I, Djambatan, Jakarta.
- Effendy Perangin, 2005, Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Irawan Soerodjo, 2002, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya.
- KBBI. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Lubis, Hari. S. B. dan Martani Husaini. 2007. Efektivitas Pelayanan Publik. Jakarta: Pustaka Binaman Presindo.
- Mohamad Mahsun. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Shidarta, 2006, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Remadja Karya, Bandung.

Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tehupeiory, A. (2012). Pentingnya pendaftaran tanah di Indonesia. Raih Asa Sukses.

Jurnal dan Penelitian

Anis Ayu Rahmawati, Achmad Sulchan. 2018. Kebijakan Untuk Memperlancar Pemberkasan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Jurnal Akta, Volume 5 Nomor 4.

Annesya Puspita S, A. P. S. (2023). Efektifitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Badan Pertanahan Nasional (Atr/Bpn) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Bagas Imam Arianto. 2019. Gunarto, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor BPN Kabupaten Grobogan, Prosiding : Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2, Unissula Semarang.

H.M Arba. 2017 Implikasi Hukum Peningkatan Status Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) Atas Rumah Tinggal Obyek Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik Terhadap Kreditur, Jurnal Hukum Jatiswara , Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Maulida Soraya Ulfah, Denny Suwondo. 2019. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Demak, Prosiding : Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2, Unissula Semarang.

Rahmat Ramadhani. 2017 Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah, *Journal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1.

Sheila Pratiwi. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis Di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sholikhudin, M. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls)(Studi Di Desa Kalipuro Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto).

Wahyu Baskoro, Jurisdiction Overview Implementation of Rights Transfer to Land & Building Registration with Selling-Buying Deed, Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR) , Vol. 3 No 2 (2021): June 2021

Internet

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, <https://kab-luwutimur.atrbpn.go.id/menu/detail/12485/sekilasa>

Masyarakat Luwu Timur Tak Komplain Biaya Sertifikat PTSL

<https://palopopos.fajar.co.id/2023/01/28/masyarakat-lutim-tak-komplain-biaya-sertifikat-ptsl/>

Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan, <https://sulsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-luwu-timur/#:~:text=Kabupaten%20Luwu%20Timur%20adalah%20salah,di%20ujung%20utara%20Teluk%20Bone>

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar*. UUD 1945

_____. *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 LN Nomor 104 Tahun 1960, TLN
Nomor 2043.

_____. *Undang-Undang Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian*. Undang-
Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960.

_____. *Undang-Undang Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.

_____. *Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik*. Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009

_____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pendaftaran Tanah*.
PP Nomor 10 Tahun 1961.

_____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pendaftaran Tanah*.
PP Nomor 24 Tahun 1997.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)
dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau bangunan*. PP Nomor 79 Tahun
1999.

_____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Badan Pertanahan
Nasional*. PP Nomor 10 Tahun 2006

_____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Peraturan Pejabat
Pembuat Akta Tanah*. PP Nomor 24 Tahun 2016

_____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah*. PP Nomor 18 Tahun 2021

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. PMA/BPN Nomor 12 Tahun 2017.

